



Optimalisasi Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Literasi Digital di Kabupaten Merauke

Nur Jalal¹, Syahrabudin Husein Enala², Syahrudin³

¹²³ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke, Indonesia

Email: nurjalal242@gmail.com¹, syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id², syahrudin@unmus.ac.id³

Received: 03-03-2025

Accepted: 04-05-2025

Published: 17-06-2025

Abstract

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serve as strategic partners of the government in disseminating information to the public, particularly in remote and rural areas. In the era of digital transformation, the role of KIM is increasingly crucial in promoting digital literacy to enhance access, understanding, and utilization of information technology among communities. This study aims to examine and optimize the role of KIM in improving digital literacy in Merauke Regency. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis with several active KIM groups in Merauke. The results show that although KIM holds great potential as agents of digital literacy, limitations in human resource capacity, technological infrastructure, and lack of training are the main challenges. Therefore, optimizing the role of KIM requires regular training, cross-sector collaboration, and regulatory and budgetary support from the local government. Thus, KIM can become key drivers in building an inclusive and competitive digital society in Merauke.

Keywords: Kelompok Informasi Masyarakat, digital literacy, digital transformation

Abstrak

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan perdesaan. Di era transformasi digital, peran KIM semakin krusial dalam mendorong literasi digital guna meningkatkan akses, pemahaman, dan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengoptimalkan peran KIM dalam meningkatkan literasi digital masyarakat di Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap beberapa KIM aktif di wilayah Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KIM memiliki potensi besar sebagai agen literasi digital, keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, dan minimnya pelatihan menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, optimalisasi peran KIM perlu dilakukan melalui pelatihan rutin, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah daerah. Dengan demikian, KIM dapat menjadi pendorong utama dalam membangun masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing di Merauke.

Kata kunci: Kelompok Informasi Masyarakat, literasi digital, transformasi digital

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara fundamental. Saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia—mulai dari transaksi ekonomi, komunikasi, hingga pelayanan publik—mengandalkan platform digital. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis atau yang dikenal dengan istilah *literasi digital* menjadi sangat krusial. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan gawai, tetapi menyangkut pemahaman yang lebih dalam mengenai etika digital, keamanan siber, serta kemampuan memproduksi dan menyebarkan konten informasi yang bertanggung jawab (Putri et al., 2023).

Namun, kemajuan TIK belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu contoh wilayah yang masih menghadapi tantangan serius dalam mengakses teknologi digital secara optimal. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur internet yang belum memadai, serta rendahnya tingkat pendidikan dan literasi digital menjadikan masyarakat Merauke berada dalam posisi yang rentan terhadap disinformasi, ketertinggalan informasi, dan keterbatasan akses terhadap layanan digital publik (Hasanah & Mariyam, 2022; BPS Papua Selatan, 2023).

Studi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa indeks literasi digital di Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan, namun kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih signifikan. Di daerah seperti Merauke, konektivitas internet belum menjadi kebutuhan pokok sebagaimana di wilayah perkotaan. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya upaya digitalisasi pemerintahan (*e-government*), keterlibatan masyarakat dalam ruang publik digital, serta minimnya partisipasi dalam agenda pembangunan yang berbasis teknologi.

Keterbatasan akses informasi juga berdampak pada meningkatnya potensi penyebaran hoaks, radikalisme digital, serta eksploitasi informasi yang salah arah. Kelemahan dalam literasi digital ini diperburuk dengan masih kuatnya budaya komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, yang cenderung bersifat top-down dan minim interaksi dialogis (Susanto, 2021). Dalam situasi demikian, dibutuhkan sebuah model komunikasi partisipatif yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara negara dan warga negara di level akar rumput.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan wadah yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat, berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan menyalurkan aspirasi warga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2010, KIM diharapkan dapat menjadi jembatan

informasi antara pemerintah dan masyarakat di daerah, terutama dalam konteks pemberdayaan komunitas melalui media informasi lokal.

Namun, peran KIM masih banyak yang terbatas pada model penyampaian informasi tradisional, seperti bulletin desa, pengumuman lisan, dan forum tatap muka. Di era digital seperti sekarang, transformasi fungsi KIM menjadi agen literasi digital menjadi sangat mendesak. Dalam praktiknya, belum banyak KIM yang mampu memanfaatkan media sosial secara maksimal, membuat konten edukatif, atau mengelola website komunitas sebagai sarana penyebaran informasi yang interaktif (Hasanah & Mariyam, 2022).

Salah satu studi menarik datang dari pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Biting, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Program pelatihan yang mengintegrasikan pelatihan jurnalistik daring, pengelolaan media sosial, dan pembuatan website desa berhasil meningkatkan keterampilan digital anggota KIM lokal. Hasilnya, mereka mampu memproduksi konten informasi berbasis lokal secara berkala dan menyebarkannya melalui kanal digital, sehingga menjangkau khalayak lebih luas dan memperkuat partisipasi warga desa dalam pembangunan (Setyaningsih & Utama, 2022).

Selain studi di Biting, berbagai inisiatif berbasis literasi digital telah dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia dengan hasil yang positif. Misalnya, di Desa Dasok (Madura), pelatihan digital melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan relawan TIK mampu menciptakan ruang belajar digital mandiri bagi pemuda dan ibu rumah tangga. Mereka diajarkan membuat blog, memanfaatkan platform e-commerce lokal, dan memahami keamanan digital dasar (Suyamto, 2024).

Hal serupa juga terjadi di Desa Garut dan Tewaowutung (Sulawesi Utara), di mana metode partisipatif digunakan untuk membangun budaya digital yang inklusif. Penggunaan pendekatan *learning by doing* terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri warga untuk menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari (Nurahman et al., 2024; Tungga et al., 2024). Faktor kunci keberhasilan dari program-program ini antara lain: pendampingan intensif, pelatihan yang kontekstual dengan kebutuhan warga, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai penggerak lokal.

Meski literatur terkait literasi digital dan pemberdayaan komunitas banyak beredar—termasuk di desa terpencil (Tambak et al.:2023; Sekar et al.:2024)—penelitian yang secara khusus mengeksplorasi peran KIM di wilayah 3T seperti Merauke masih sangat terbatas. Lebih jauh, analisis komprehensif terhadap kendala struktural (SDM, manajemen, kolaborasi antar-pemangku kepentingan) dan model keberlanjutan kelembagaan KIM jarang dibahas dalam konteks Merauke. Penelitian ini menyajikan tiga kebaruan utama: (1) Konteks Spesifik: Studi fokus pada Kabupaten Merauke, daerah khas 3T dengan tantangan digital unik (akses, budaya, geografis). (2) Peran Ganda KIM: Tidak hanya sebagai pengantar informasi, tetapi sebagai fasilitator edukasi digital melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. (3) Model Optimalisasi: Menyusun model peningkatan kapasitas berbasis

pelatihan teknis (website, media sosial, literasi media), kolaborasi lintas sektor (pemerintah, perguruan tinggi, relawan), serta dukungan kebijakan/anggaran lokal—diharapkan dapat direplikasi ke daerah 3T lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam meningkatkan literasi digital di Kabupaten Merauke. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada beberapa KIM aktif sebagai unit analisis. Penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2025. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari pengurus KIM, aparat desa, dinas komunikasi dan informatika, serta masyarakat penerima manfaat. Sumber data terdiri dari data primer, seperti hasil wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder, seperti dokumen program, laporan kegiatan, dan kebijakan daerah terkait KIM dan literasi digital. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan temuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran holistik tentang peran, tantangan, dan potensi optimalisasi KIM sebagai agen literasi digital di wilayah 3T seperti Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam meningkatkan literasi digital masyarakat di Kabupaten Merauke. Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap beberapa KIM aktif di wilayah Merauke, hasil penelitian ini dijabarkan dalam tiga indikator utama: peran KIM dalam literasi digital, tantangan yang dihadapi KIM, serta strategi optimalisasi peran KIM. Setiap indikator disajikan dengan penjabaran hasil temuan lapangan dan pembahasan yang mengacu pada teori dan hasil studi sebelumnya.

1. Peran KIM dalam Literasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIM di Kabupaten Merauke masih menjalankan peran tradisional sebagai penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat. Fungsi utama yang dijalankan adalah menyebarkan informasi tentang kebijakan, layanan publik, dan kegiatan pemerintahan melalui media cetak, grup WhatsApp, dan pertemuan warga. Sebagian kecil KIM telah mulai memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram, namun belum digunakan secara maksimal untuk konten edukatif atau pelatihan literasi digital.

Dari hasil wawancara dengan pengurus KIM di Kampung Sota dan Kampung Kweel, diketahui bahwa literasi digital belum menjadi fokus utama program KIM. Kegiatan mereka lebih banyak bersifat penyuluhan umum dibandingkan pelatihan teknis. Pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital, literasi media, dan kemampuan

memverifikasi informasi masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi KIM sebagai agen literasi digital belum berkembang secara optimal.

Pembahasan terhadap temuan ini memperlihatkan bahwa KIM belum menjalankan peran ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai agen literasi digital masyarakat. Menurut Hasanah dan Mariyam (2022), KIM seharusnya tidak hanya menjadi saluran informasi satu arah, tetapi juga menjadi fasilitator edukatif yang mampu mengajarkan masyarakat cara menggunakan internet secara produktif dan aman. Ketidaksiapan KIM dalam mengadopsi peran ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa literasi digital masih belum menjadi agenda prioritas di banyak wilayah 3T.

2. Tantangan yang Dihadapi KIM

Temuan lapangan mengungkapkan berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran KIM. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak pengurus KIM tidak memiliki latar belakang teknologi informasi, sehingga kurang percaya diri dalam menyampaikan materi digital kepada masyarakat. Selain itu, kurangnya pelatihan rutin dan keterbatasan akses terhadap materi literasi digital juga menjadi hambatan.

Dari sisi infrastruktur, banyak wilayah di Kabupaten Merauke, terutama yang berada jauh dari pusat kota, mengalami keterbatasan jaringan internet. Beberapa KIM bahkan tidak memiliki perangkat dasar seperti komputer, proyektor, atau speaker yang mendukung kegiatan edukasi digital. Selain itu, keberlanjutan program KIM juga terganggu oleh minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk bantuan operasional maupun alokasi dana untuk pengembangan kapasitas.

Dalam pembahasan, temuan ini sejalan dengan studi Setyaningsih dan Utama (2022) yang menyatakan bahwa KIM akan sulit berkembang tanpa adanya penguatan kelembagaan, pembinaan rutin, dan dukungan finansial. Lemahnya dukungan sistemik menyebabkan KIM hanya bergantung pada inisiatif individu, bukan sebagai kelembagaan yang kuat. Di samping itu, tidak adanya regulasi yang secara tegas mengatur peran dan pembiayaan KIM menyebabkan status kelembagaan KIM bersifat informal, sehingga kurang mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi Optimalisasi Peran KIM

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam, terdapat beberapa strategi yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan peran KIM. Strategi pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. KIM meminta adanya kerja sama dengan perguruan tinggi dan relawan TIK untuk mendampingi mereka dalam menyusun dan menyampaikan materi pelatihan.

Strategi kedua adalah penguatan infrastruktur pendukung. Beberapa KIM mengusulkan pengadaan perangkat digital melalui dana desa, program CSR perusahaan, atau hibah pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses edukasi digital yang lebih interaktif dan modern. Ketiga, KIM juga menyampaikan pentingnya legalisasi kelembagaan melalui peraturan daerah agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengakses anggaran pembangunan.

Pembahasan terhadap strategi ini menunjukkan bahwa KIM memiliki potensi besar untuk menjadi agen literasi digital apabila didukung secara berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program literasi digital berbasis komunitas. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian World Bank (2020), pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas akan berhasil bila didukung oleh jejaring kelembagaan yang kuat dan pendekatan partisipatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melihat KIM sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia digital, khususnya di wilayah 3T seperti Merauke.

Dengan adanya strategi optimalisasi yang menyeluruh dan didukung oleh kebijakan serta sumber daya yang memadai, KIM di Kabupaten Merauke memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor transformasi digital di tingkat akar rumput dan meningkatkan literasi digital masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke memiliki peran strategis dalam mendorong literasi digital, namun peran tersebut belum berjalan secara optimal. KIM masih dominan menjalankan fungsi diseminasi informasi secara konvensional, dan belum sepenuhnya bertransformasi sebagai agen edukasi digital masyarakat. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta minimnya dukungan regulasi dan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi peran tersebut. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya semangat dan potensi besar dari pengurus KIM untuk berkembang, apabila didukung dengan pelatihan yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta sinergi lintas sektor. Strategi kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan KIM sebagai pelopor literasi digital di wilayah 3T seperti Merauke. Dengan demikian, optimalisasi peran KIM tidak hanya relevan dalam konteks transformasi digital nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing di era digital.

Referensi

- Huda, M., Maulana, I., Uriva, M., & Hidayati, L. (2024). *Pemanfaatan literasi digital melalui pengelolaan website dan media sosial desa menuju desa go digital*. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*.
- Magister, F. (2024). *Literasi digital media penyiaran di daerah 3T: studi kasus di Riau*. *Juris Humanity*.
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.38>
- Nurahman, A., Kurnia, A., & Muljanto, S. (2024). *Inovasi literasi digital di Desa Dunguswiru Garut*. *Konferensi Nasional Literasi Digital*.
<https://doi.org/10.57119/knldk.v1i.50>
- Setyaningsih, R. S., & Utama, S. N. (2022). *Pendampingan literasi digital untuk pengembangan KIM Desa Biting*. *J-ABDI*.
<https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i12.2050>
- Tambak, S. B., Musrifah, A., & Damayanti, S. K. (2023). *Penyuluhan peningkatan literasi, numerasi dan adaptasi teknologi di sekolah 3T*. *Journal of Empowerment*.
- Tungga, C. C., Due Rema, K. S., & Bouk, H. S. (2024). *Sosialisasi literasi digital membangun desa melalui media digital (Desa Tewaowutung)*. *MENGABDI*.
<https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i6.1135>
- Hasanah, N., & Mariyam, S. (2022). Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Meningkatkan Literasi Digital di Era Transformasi Digital. *Jurnal Komunikasi dan Digitalisasi*, 6(2), 89–98.
- Setyaningsih, R., & Utama, A. (2022). Pemberdayaan KIM dalam Penguatan Literasi Digital Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 8(1), 35–42.
- World Bank. (2020). *Digital Economy for Indonesia: Accelerating Inclusive Digital Transformation*. Washington, DC: World Bank.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018). *Panduan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)*. Jakarta: Direktorat Jenderal IKP.
- Syahputra, I., & Heriyanto. (2021). Literasi Digital dan Ketahanan Informasi di Kalangan Komunitas Lokal. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 12–24.
- Yunita, S., & Prasetyo, W. (2019). Analisis Peran KIM sebagai Media Informasi Desa dalam Era Digital. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 7(2), 55–64.
- Sutrisno, H., & Widodo, W. (2020). Literasi Digital sebagai Pilar Masyarakat Informasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45–60.

- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377065>
- Sari, D. P., & Rohman, F. (2023). Peran Komunitas Lokal dalam Meningkatkan Kesiapan Literasi Digital Masyarakat. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi*, 11(3), 110–122.